

**IMPLEMENTASI PROYEK FOREST LAW ENFORCEMENT GOVERNANCE
TRADE-VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT (FLEGT-VPA) DI
VIETNAM OLEH UNI EROPA**

Oleh: Annisa Andriani

Email: annisaandriani2706@gmail.com

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP.,MA

Email: irwan.iskandar@lecturer.unri.ac.id

Bibliografi: 16 Buku, 10 Jurnal, 11 Situs Web, 15 Dokumen Resmi

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. (0761) – 63277, 23430

Abstract

Illegal logging plays a role in the destruction of forests around the world and affects the people who live in them and rely on forest-generated resources. The European Union is one of the largest consumers of wood products in the world. As the biggest consumer, the EU has finally entered into an agreement with their wood supplying country with the FLEGT-VPA project which is expected to overcome illegal logging cases.

This study uses a Pluralism perspective which focuses on the analysis of the International Organization level and the theory of international cooperation. Using the theory of international cooperation, this study aims to reveal the implementation of the Forest Law Enforcement Governance Trade-Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) Project in Vietnam by the European Union.

This study explains that the FLEGT-VPA project has strategic value obtained by the European Union and partner countries, for example in this case is Vietnam. The implementations carried out by the European Union in this project include Preparation of the VPA Implementation Structure, Development of a Legality Assurance System, Public Information Disclosure Mechanism, Independent Joint Evaluation of the Timber Legality Assurance System, FLEGT Licensed Timber Exports and European Union Border Control, and Monitoring the impact of this project. This implementation is still ongoing and can be said to be good, supported by regulations published by the Vietnamese government.

Keywords: FLEGT-VPA, Implementation, European Union, Vietnam.

PENDAHULUAN

Pembalakan liar memainkan peran dalam penghancuran hutan di seluruh dunia dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di dalamnya dan bergantung pada sumber daya yang dihasilkan hutan. UE (Uni Eropa) adalah salah satu konsumen terbesar produk kayu di dunia. Perusahaan dan pemerintah UE yang membeli kayu dan produk kayu dari pemasok di Afrika, Asia atau Amerika Selatan memiliki dampak signifikan pada penebangan liar. Jika UE tanpa disadari membeli kayu ilegal, tercipta pasar yang menguntungkan bagi penebang liar dan merusak upaya untuk menegakkan hukum hutan di negara-negara pengeksport kayu. Jika membeli kayu dari produsen yang mematuhi hukum nasional, berarti turun langsung bertindak secara bertanggung jawab terhadap penduduk setempat dan kelestarian lingkungan, ini akan membantu mengurangi penebangan liar.¹

Pembalakan liar dan perdagangan yang terkait dengannya juga melemahkan daya saing operasi industri kehutanan yang sah baik di negara pengeksport dan negara pengimpor. Dengan demikian, hal tersebut membatasi kemampuan industri-industri itu untuk berupaya mengembangkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan juga pembangunan berkelanjutan secara umum. Pembalakan liar juga telah menimbulkan kerugian pendapatan negara penghasil kayu sebesar €10-15 miliar per tahun yang sebenarnya bisa

digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya, termasuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pembalakan liar juga telah menjadi penyebab kerusakan alam dan kehilangan keanekaragaman hayati yang sangat besar dan berimplikasi terhadap perubahan iklim.²

Oleh karena itu, pembalakan liar telah merusak banyak unsur-unsur penting dari sasaran-sasaran pembangunan, yakni sektor keuangan publik untuk pembangunan yang diarahkan pada kemiskinan, perdamaian, keamanan, tata pemerintahan yang baik, perang melawan korupsi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam hal ini UE ingin memainkan peranan yang aktif sebagai aktor dunia yang dapat menjaga perdamaian dunia.³

Pada tahun 2009, PROFOREST melakukan studi tentang sektor kehutanan di Vietnam, yang ditugaskan oleh *European Forestry Institute* (EFI). Laporan ini mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan peran Vietnam sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di dunia untuk perdagangan produk kayu, terutama karena terkait dengan sumber kayu yang diproduksi secara hukum. Ini menganalisis opsi untuk pemerintah Vietnam dan Komisi Eropa jika mereka setuju untuk melanjutkan Perjanjian

¹ <https://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan>. Diakses pada 29 Desember 2020

² <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23398/FLEGT+Action+Plan/3c0cfca1-1503-458a-9d05-1717bf226e23>

³ Irwan Iskandar. 2017. "Motivasi dan Implementasi Flegt (Forest Law Enforcement, Governance And Trade) Project" Diakses melalui <http://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9610>

Kemitraan Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan (FLEGT VPA). Rencana untuk melanjutkan dengan FLEGT VPA kemudian dimulai pada tahun 2010.

Vietnam memiliki sekitar 16,2 juta hektar hutan, di mana 12,6 juta di antaranya sebenarnya tertutup oleh hutan. Tutupan hutan meningkat dari sekitar 33% pada tahun 2000 menjadi 39,1% pada tahun 2009, sama dengan sekitar 2,35 juta ha (Tran The Lien, 2011). Hutan di Vietnam dikategorikan ke dalam tiga kategori utama: (i) hutan khusus penggunaan, terutama kawasan lindung, menyumbang 1,94 juta ha. (ii) hutan lindung (4,38 juta ha), terutama untuk perlindungan daerah aliran sungai, dan (iii) hutan produksi (6,28 juta ha). Sekitar 78% hutan di Vietnam adalah hutan alam. Sisanya 22% adalah hutan perkebunan.⁴ EU merupakan salah satu dari 5 negara selain US, Jepang Cina dan Korea Selatan sebagai pasar kayu terbesar dari Vietnam.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif Pluralisme

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Namun, pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi terdapat aktor-aktor selain negara, hal ini dikemukakan oleh perspektif pluralisme. Dalam konteks ini, perspektif pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dalam Hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor

negara melainkan pula aktor non negara termasuk pula didalamnya masyarakat.

Empat asumsi perspektif pluralisme adalah:

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, MNC, kelompok ataupun individu.
2. Negara bukanlah unitary actor/ aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.⁵

b. Tingkat Analisa Organisasi Internasional

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa organisasi internasional. Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara berdaulat dengan

⁴ Baseline Study Vietnam. Diakses melalui <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23308/Baseline+Study+3,%252520Vietnam>. Pada 4 Januari 2021.

⁵ Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. New York: Allyn & Bacon, 1992-1993 (dalam buku Anak Agung Banyu Perwita, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hlm.26.

tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama.⁶

Peranan organisasi internasional sendiri dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: sebagai instrument, arena dan aktor independen. Dari ketiga kategori diatas, eksplorasi dan analisis dilakukan oleh organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator.⁷

c. Teori Kerjasama Internasional

Negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang

diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

FLEGT adalah singkatan penegakan hukum hutan, tata kelola dan perdagangan. Uni Eropa menerbitkan Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa pada tahun 2003. Rencana Aksi ini bertujuan untuk mengurangi pembalakan liar dengan memperkuat keberlanjutan dan legalitas pengelolaan hutan, meningkatkan tata kelola hutan dan mempromosikan perdagangan kayu yang diproduksi secara hukum. FLEGT mengambil pendekatan multidimensi dan koheren untuk mengatasi kemungkinan penebangan liar. Pendekatan ini mencakup lima huruf F-L-E-G-T dan tujuh elemen Rencana Aksi.⁹

Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) adalah komponen kunci dari Kebijakan Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) UE untuk menangani permasalahan pembalakan kayu ilegal. Setiap VPA adalah kesepakatan

⁶ Clive Archer, International Organization, George Allen and Unwin Publisher London. 1983. Hal 35.

⁷ Situmorang dalam Andre Pareira, ed.1999. Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 135.

⁸ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hlm 652-653.

⁹ Diakses melalui <http://www.flegt.org/about-flegt>.

perdagangan bilateral yang dirundingkan antara UE dengan negara-negara pengekspor kayu diluar Uni Eropa. Meskipun para pihak memasuki VPA secara sukarela namun kesepakatannya kemudian mengikat secara hukum ketika kedua pihak meratifikasinya.

VPA berbeda dengan kesepakatan perdagangan bilateral pada umumnya dalam berbagai hal. Pertama, meskipun perundingan dilakukan oleh Uni Eropa dan pemerintah, namun isi perjanjian diputuskan di negara mitra melalui proses konsultasi musyawarah yang melibatkan para stakeholders dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini berarti, misalnya, bahwa para stakeholders nasional memutuskan bagaimana menentukan legal tidaknya kayu menurut hukum di negara itu. Kedua, tidak seperti di sebagian besar perjanjian perdagangan lainnya, kedua pihak bernegosiasi menuju tujuan yang sama yakni menghilangkan kayu ilegal dan meningkatkan tata kelola hutan. Ketiga, VPA menanamkan reformasi legal dan tata kelola dalam proses-prosesnya dan narasinya. Reformasi-reformasi tersebut merupakan hasil dari identifikasi para pihak yang dianggap penting untuk memastikan kredibilitas VPA. Ini berarti, VPA dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, kombinasi yang unik VPA ini dari tuas perdagangan dan reformasi tata kelola, dan pendekatan multipihak untuk negosiasi dan implementasi, dapat

memenuhi tujuan sosial dan lingkungan, serta ekonomi.¹⁰

a. Linimasa Proyek FLEGT-VPA di Vietnam

Pemerintah Vietnam dan Uni Eropa mengadakan negosiasi tentang FLEGT-VPA pada November 2010. Dilanjutkan tahun 2016 ketika EU dan Vietnam mencapai kesepakatan mengenai prinsip didalam ketentuan VPA. Kemudian pada 11 Mei 2017, EU dan Vietnam menginisialisasi adanya VPA dengan membentuk komite persiapan bersama untuk mengawasi kemajuan menuju implementasi VPA dalam periode antara menyetujui dan meratifikasi VPA, pada November 2017 Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Kehutanan yang baru. Secara resmi kedua belah pihak menandatangani Perjanjian pada 19 Oktober 2018 di Brussels, Belgia. Perjanjian ini disahkan oleh Parlemen Eropa pada 15 April 2019 dan disetujui oleh Pemerintah Vietnam pada 23 April 2019 berdasarkan Resolusi No. 25/NQ-CP. Dengan demikian, sudah mulai berlaku sejak 1 Juni 2019. Dan Vietnam mengeluarkan Keputusan Pemerintah menyetujui rencana implementasi VPA pada November 2019.¹¹

b. Implementasi Proyek FLEGT-VPA di Vietnam

Pada tanggal 1 Juni 2019, Perjanjian VPA/FLEGT mulai berlaku dan pada tanggal 14 November 2019, Pemerintah mengeluarkan Keputusan No.1624/QD-TTg yang menyetujui rencana implementasi VPA dengan

¹⁰ Diakses melalui <https://www.vpaunpacked.org/in/vpau-what-is-a-vpa> Diakses pada Juni 2021.

¹¹ <https://www.euflegt.efi.int/background-vietnam>.

penugasan kementerian/lembaga untuk melaksanakan Perjanjian tersebut secara maksimal.¹² Berikut adalah langkah-langkah pengimplementasian proyek FLEGT-VPA di Vietnam.

1. Persiapan Struktur Implementasi VPA

Persiapan ini termasuk struktur nasional dan bilateral seperti yang dijelaskan dalam naskah VPA dan lampirannya, dan struktur-struktur lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan VPA. Struktur tersebut biasanya termasuk badan multipihak nasional, lembaga pelaksana dan komite implementasi bersama.

Komite Implementasi Bersama UE-Vietnam (JIC) akan mengawasi bagaimana ketentuan Perjanjian dipraktikkan, sementara Kelompok Multi-Stakeholder Core Group menyediakan sarana bagi kelompok masyarakat sipil Vietnam, akademisi dan asosiasi bisnis untuk terlibat dalam implementasi VPA dan memberikan masukan kepada JIC

Vietnam dan Uni Eropa membentuk JIC untuk memfasilitasi manajemen, pemantauan, dan peninjauan Perjanjian. JIC akan bertemu setidaknya dua kali setahun dalam dua tahun pertama pelaksanaan, dan sekali per tahun setelahnya. Rapat tambahan dapat diselenggarakan atas permintaan salah satu Pihak.

Salah satu fungsi JIC adalah untuk mempublikasikan informasi tentang Perjanjian, termasuk Laporan Tahunan tentang kemajuan implementasi, risalah rapat dan

rangkuman keputusan Komite Pelaksana Bersama, dan informasi tentang evaluasi independen, termasuk prosedur dan laporan ringkasan publik.

2. Pengembangan Sistem Jaminan Legalitas

Negara mitra dalam hal ini Vietnam perlu memperbaiki sistem yang ada dan kemungkinan mengembangkan sistem yang baru jika semua elemen dari sistem jaminan legalitas kayu, seperti yang dijelaskan dalam VPA, belum bersifat operasional. Semua negara pengekspor kayu yang telah menandatangani VPA sampai saat ini harus memperbaiki sistem yang ada sebelum pindah ke lisensi FLEGT. Sebagai bagian dari sistem jaminan legalitas kayu, negara mitra, berkonsultasi dengan Uni Eropa kemudian juga menunjuk auditor independen, yang kerangka acuannya membentuk lampiran untuk VPA.

3. Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik¹³

Keterbukaan dalam hal ini berarti langkah-langkah yang diambil untuk membuat urusan pemerintahan transparan dan partisipatif kepada masyarakat sebisa mungkin, dan untuk memperkuat kepercayaan umum pada lembaga-lembaga publik. Sehingga keterbukaan akses informasi publik bermakna langkah-langkah yang dapat atau harus diambil oleh otoritas publik untuk

¹²http://xml18.quangtri.gov.vn/xml_snnnt/VBDI/2020.11.20_bao_cao_FLEGTHVPA_pdf. Diakses pada November 2021.

¹³ Annex to the council decision on the signing, on behalf of the Union, of the VPA between the EU and Viet Nam on FLEGT. Diakses melalui https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b2424ac4-7ea6-11e8-ac6a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF.

membuat pelaksanaan urusan publik secara transparan.¹⁴

Dalam hal ini keterbukaan informasi publik dilakukan melalui publikasi media massa dan juga terdapat pada website resmi FLEGT yang dapat diakses oleh semua kalangan.

4. Evaluasi Bersama Independen dari Sistem Jaminan Legalitas Kayu

Melalui Vietnam Timber Legality Assurance System (VNTLAS). VNTLAS bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu adalah legal didasarkan pada peraturan yang relevan dengan setiap langkah rantai pasokan kayu, termasuk panen, impor, transportasi, pengolahan, perdagangan dan ekspor kayu.

VNTLAS didasarkan pada undang-undang nasional yang berlaku, bersama dengan peraturan yang diperkenalkan untuk mengimplementasikan Perjanjian ini, yang mencakup partisipasi kementerian, sektor, daerah, dan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil yang relevan dengan kehutanan dan perdagangan kayu.

5. Ekspor Kayu Berlisensi FLEGT dan Kontrol Perbatasan Uni Eropa

Setelah VPA sepenuhnya dilaksanakan, dan penilaian bersama oleh Uni Eropa dan Vietnam mengkonfirmasi hal ini, para pihak akan menetapkan tanggal dari mana Vietnam akan menerbitkan lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu hukum terverifikasi yang terikat UE. Produk berlisensi FLEGT akan

secara otomatis memenuhi persyaratan Peraturan Kayu UE, yang melarang penempatan kayu ilegal di pasar UE. Sampai perizinan FLEGT dimulai, impor ke UE dari Vietnam akan terus tunduk pada persyaratan uji tuntas Peraturan Kayu UE yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko menempatkan produk ilegal di pasar Uni dapat diabaikan.

6. Pemantauan Dampak Proyek FLEGT-VPA

Semua VPA mewajibkan para pihak untuk mengembangkan kerangka kerja pemantauan dampak. Oleh karena itu komite implementasi bersama memastikan ketersediaan kerangka kerja untuk memantau dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari VPA dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan.¹⁵

Beberapa dampak positif selama negosiasi FLEGT-VPA:

- Konsolidasi peraturan perundang-undangan.
- Klarifikasi hak guna lahan hutan.
- Pengelolaan dan perlindungan hutan alam dalam negeri.
- Konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan.

7. Peningkatan Kesadaran Negara Mitra FLEGT-VPA

Para pihak dan stakeholders lainnya didalam VPA juga terlibat dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai VPA dan meningkatkan visibilitas pasar untuk kayu berlisensi FLEGT. Kegiatan ini termasuk didalamnya publikasi dan kampanye yang diselenggarakan

¹⁴ An Introduction to Openness and Access to Information. Diakses melalui https://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/articles/handbook_intro_to_openness_&_ai.pdf. Pada November 2021.

¹⁵ *Ibid.*

untuk menambah kesadaran akan pentingnya proyek yang dilaksanakan FLEGT saat ini terkhusus di Vietnam.¹⁶

8. Pengembangan Peraturan Terkait FLEGT-VPA

Vietnam mengeluarkan peraturan terkait pengembangan VPA melalui:

- Majelis Nasional
- Kementerian Peindustrian dan Perdagangan¹⁷

PENUTUP

Pemerintah Vietnam menganggap hutan sebagai sumber daya ekologis yang penting dan berharga bagi pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri. Dengan meningkatnya tingkat pembangunan, kehutanan telah berubah dari modus tradisional berdasarkan panen hutan alam menjadi lebih pijakan sosial dengan partisipasi yang lebih besar. Perlindungan hutan alam yang ada, penghijauan lahan kosong, penanaman hutan produksi dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan adalah, di bawah kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pentingnya kehutanan.

Implementasi FLEGT-VPA akan membawa berbagai manfaat ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola kepada Vietnam seperti peningkatan akses ke peluang pasar Uni Eropa, peningkatan citra global dan posisi pasar produk kayu Vietnam,

perbaikan tata kelola hutan, mempromosikan dan meningkatkan nilai produksi kayu dalam negeri, meningkatkan transparansi sektor kelola hutan. Implementasi ini akan dilakukan secara bertahap melalui tahapan yang terstruktur dan akan memakan waktu beberapa tahun sebelum benar-benar terlaksana sepenuhnya.

Referensi

<https://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan>. Diakses pada 29 Desember 2020.

<http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23398/FLEGT+Action+Plan/3c0cfca1-1503-458a-9d05-1717bf226e23>

Irwan Iskandar. 2017. "Motivasi dan Implementasi Flegt (Forest Law Enforcement, Governance And Trade) Project" Diakses melalui <http://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9610>

Baseline Study Vietnam. Diakses melalui <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23308/Baseline+Study+3,%252520Vietnam>. Pada 4 Januari 2021.

Diakses melalui <http://www.flegt.org/about-flegt>.

Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. New York: Allyn & Bacon, 1992-1993 (dalam buku Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hlm.26.

¹⁶ Vietnam-EU VPA-FLEGT1st Joint Implementation Committee Summary. Diakses melalui https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/485351/VN-EU+VPA-FLEGT_1st+Joint+Implementation+Committee_15November2019_Summary+Minutes_English.pdf.

¹⁷http://flegt.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=8c1a3874-621f-4691-a27c-b26a8cc0995a. Diakses pada November 2021.

Clive Archer, International Organization, George Allen and Unwin Publisher London. 1983. Hal 35.

Situmorang dalam Andre Pareira, ed.1999. Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 135.

K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hlm 652-653.

<https://www.vpaunpacked.org/in/vpau-what-is-a-vpa> Diakses pada Juni 2021.

<https://www.euflegt.efi.int/background-vietnam>.

An Introduction to Openness and Access to Information. Diakses melalui https://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/articles/handbook_intro_to_openness_&_ai.pdf. Pada November 2021.

Annex to the council decision on the signing, on behalf of the Union, of the VPA between the EU and Viet Nam on FLEGT. Diakses melalui https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b2424ac4-7ea6-11e8-ac6a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF.

Vietnam-EU VPA-FLEGT1st Joint Implementation Committee Summary. Diakses melalui <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/485351/VN->

EU+VPA-FLEGT_1st+Joint+Implementation+Committee_15November2019_Summary+Minutes_English.pdf.

http://flegt.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=8c1a3874-621f-4691-a27c-b26a8cc0995a. Diakses pada November 2021.

http://xml18.quangtri.gov.vn/xml_snnnt/VBDI/2020.11.20_bao_cao_FLEGTHVPA_pdf. Diakses pada November 2021.